
**Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam
Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan**

**Arif S. Paputungan¹
Sofia E. Pangemanan²
Neni Kumayas³**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat terdapat frase bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia demi kesejahteraan umum. Oleh sebab itu maka suatu keharusan pemerintah untuk melakukan perlindungan dalam hal penanggulangan bencana. Oleh karena hal tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang tentang penanggulangan bencana yang dituangkan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bencana tidak dapat diprediksi dan diharapkan namun selaku pemerintah harus siap siaga menghadapi semua kemungkinan terburuk dengan menyiapkan sarana prasarana dan sumberdaya yang kompeten. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow khususnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Kinerja BPBD kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam seperti bencana banjir sudah cukup baik, akan tetapi belum maksimal karena tidak semua indikator terpenuhi, salah satunya adalah BPBD termasuk lambat dalam melakukan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah pasca bencana yang sampai setahun terakhir dari bencana terjadi belum terlaksana dengan sepenuhnya

Kata Kunci : Kinerja, BPBD, Bencana Banjir

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang merupakan salah satu dari 11 kabupaten dan 4 kota di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki potensi bencana alam, telah menindaklanjutinya dengan mendirikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Kab. Bolaang Mongondow Selatan Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang rentan akan berbagai macam bencana, diantaranya bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran, dapat dilihat dari bencana banjir bandang yang terjadi pada bulan Juli tahun 2020 di Kab. Bolaang Mongondow Selatan yang mengakibatkan kerugian materil serta menimbulkan korban jiwa.

Informasi mengenai bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal 24 Juli 2020 tercatat ada Tiga kecamatan yang dilanda banjir akibat hujan deras serta meluapnya beberapa sungai. Tiga kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Bolaang Uki merendam rumah milik 2.978 Kepala keluarga, Kecamatan Helumo 225 Kepala Keluarga, dan Kecamatan Tomini rumah milik 101 Kepala keluarga. Berdasarkan data yang didapat, 52 rumah rusak berat dan hanyut, 5 jembatan penghubung rusak, bahkan ada yang terputus, longsor di ruas jalan Desa Dudepo dengan panjang sekitar 5 meter dan diketahui 1 orang kepala desa terseret arus banjir dan sampai sekarang tidak ditemukan.

Banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir yang dimulai dari kerugian materil serta menimbulkan korban jiwa, maka penanganan masalah bencana banjir ini harus dilakukan dengan serius. Pasalnya banjir ini dapat mengganggu proses pembangunan yang telah direncanakan pemerintah.

Dari data wilayah yang terkena dampak bencana banjir di atas menggambarkan bahwa terdapat permasalahan terkait dengan timbulnya atau terjadinya bencana banjir. Timbulnya bencana banjir dikarenakan curah hujan yang berlangsung selama berhari-hari dan meluapnya air sungai.

Melalui BPBD Kab. Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, khususnya dalam penanggulangan bencana banjir, maka pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kab. Bolaang Mongondow Selatan diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik. Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibantu beberapa Dinas dan Lembaga terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, PMI dan TAGANA.

Permasalahan penanggulangan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tampak semakin berat dan kompleks, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan *urgent* dari semua pemangku kepentingan, khususnya BPBD selaku lembaga pemerintah yang melaksakan tugas penanggulangan bencana di daerah. Akan tetapi dengan kurangnya sumber daya manusia yang diketahui hanya berjumlah 13 orang dan fasilitas penanggulangan bencana yang tidak

tersedia sehingga menyebabkan kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dinilai belum sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD yang tercantum dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan nomor 112 Tahun 2016.

BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyelenggarakan fungsi, Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana terencana, terpadu dan menyeluruh.

Atas dasar dari peristiwa bencana yang terjadi, maka dibutuhkan kinerja yang baik dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat ditanggulangi dengan baik dan cepat.

Tinjauan Pustaka

Konsep Kinerja

Menurut Pasolong (2010: 175) konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku

dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut.

Menurut Indra Bastian (Fahmi, 2013: 128) menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (strategic planning) suatu organisasi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

1. Efektifitas dan Efisiensi

Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien (Prawirosentono, 1999:27).

2. Otoritas (wewenang)

Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya (Prawirosentono, 1999:27). Perintah tersebut mengatakan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut.

3. Disiplin

Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku (Prawirosentono, 1999:27). Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja.

4. Inisiatif

Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. (Prawirasentono, 1999:27).

Pengertian Bencana

Menurut Parker (1992), bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi, disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu, maupun lingkungan untuk memberikan antusiasme yang bersifat luas.

Menurut Coburn, A. W. (dalam Purnomo, hadi, 1994:16) mengemukakan bahwa bencana adalah satu kejadian atau serangkaian kejadian yang memberi peningkatan jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada diluar kapasitas normal.

Menurut Purnomo dan Sugiantoro (2010:9) pemahaman tentang istilah bencana dari beberapa orang meskipun beragam, namun pada akhirnya semuanya mengindikasikan sebagai peristiwa buruk yang merugikan kehidupan manusia. Pengertian Bencana sendiri dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Bencana Alam

Bencana alam merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

2. Bencana non alam

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit

3. Bencana sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan menggunakan teori dari Indra Bastian (Fahmi, 2013: 128) yang menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (strategic planning) suatu organisasi. Dalam hal ini peneliti mengambil tiga pokok aspek gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan, meliputi:

1. Kegiatan BPBD Bolaang Mongondow Selatan
2. Program BPBD Bolaang Mongondow Selatan
3. Kebijakan BPBD Bolaang Mongondow Selatan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (strategic planning) suatu organisasi.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
5. PMI Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
6. TAGANA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
7. Masyarakat terdampak Bencana (4 orang)

Pembahasan

Hasil Wawancara

Data diperoleh peneliti dari hasil wawancara kepada informan yang merupakan Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, PMI Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, TAGANA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Masyarakat terdampak Bencana (4 orang). Dalam mewawancarai setiap informan ada beberapa indikator dari fokus penelitian mengenai Program, Kegiatan, dan Kebijakan BPBD, serta tanggapan masyarakat mengenai penanggulangan bencana banjir yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

1. Bapak Daanan Mokodompit selaku Kepala BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam wawancara dengan pertanyaan:
 - a. Bagaimana koordinasi mengenai terjadinya bencana kepada pihak BPBD? "Pada saat terjadinya bencana, secara spontanitas BPBD langsung turun ke tempat-tempat terjadinya bencana, disamping itu juga ada SK Bupati tentang penetapan status tanggap darurat, selanjutnya BPBD langsung melakukan kegiatan penanggulangan bencana seperti pendataan korban bencana melalui pemerintah desa, mengevakuasi korban bencana, membuat tempat pengungsian dan posko terpadu bersama relawan BPBD dan Dinas/instansi terkait."
 - b. Bagaimana koordinasi BPBD dengan dinas/instansi terkait dalam penanggulangan bencana? "Koordinasinya ada pada lintas pimpinan dalam hal ini kepala dinas dan juga kepala badan saat itu menjadi kepala pelaksana dan bertanggung jawab langsung ke Sekretaris daerah, jadi komandonya ada pada sekretaris daerah. Dalam penanggulangan bencana banjir tentunya melibatkan beberapa

dinas/instansi terkait, seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pu, dan organisasi lainnya. Dinas terkait juga ini sudah punya tugas masing-masing dalam kegiatan penanggulangan bencana, seperti dinas kesehatan yang berkoordinasi dengan BPBD dalam pelayanan dibidang kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan gratis, dan obat-obatan gratis. Begitupun dengan Dinas lainnya, dinas PU membantu membuka jalan apabila ada jalan yang rusak tertutup longsor dan jembatan yang runtuh, dan dinas sosial juga membantu dalam pendistribusian logistik dan bantuan makanan sehari-hari atau dapur umum untuk korban bencana banjir.

- c. Bagaimana BPBD mengkoordinasikan tempat-tempat pengungsian? "Disetiap tempat bencana BPBD dan dinas terkait membuat tempat pengungsian dan posko bantuan yang aman dari bencana banjir susulan, dan juga membuat dapur umum yang dibantu oleh relawan Dinas Sosial."
- d. Bagaimana BPBD mengkoordinasikan penyaluran bantuan ke tempat pengungsian yang terpisah? "BPBD melibatkan relawan, saat ini BPBD mempunyai relawan yg berjumlah 50 orang. Nantinya relawan ini difasilitasi kendaraan bermotor dan mobil pengangkut seperti pick-up yang akan membantu BPBD dalam penyaluran bantuan dari posko terpadu BPBD ke tempat-tempat pengungsian yang terpisah."
- e. Apa saja kendala yang dialami oleh BPBD dilapangan pasca terjadinya bencana? "Fasilitas penanggulangan bencana yang sangat kurang. BPBD hanya mempunyai fasilitas seperti 1 mobil rescue jenis pick-up, 1 perahu karet, 1 mobil truck pengangkut logistik, beberapa perlengkapan tenda-tenda pengungsi sehingga BPBD merasa kurang maksimal dalam penyaluran bantuan logistik dan persediaan tenda pengungsi di beberapa tempat terpisah. Terputusnya komunikasi dan transportasi sedangkan

- pemulihan/fasilitas komunikasi dan transportasi darurat tidak bisa segera dilakukan, petugas lapangan, relawan mengalami kelelahan akibat tugas/hal yang harus dikerjakan terlalu banyak dan terus menerus sedangkan waktu sangat terbatas, dan ketidakpuasan atau ketidaksabaran korban karena bantuan terlambat datang ”
- f. Bagaimana pengkajian bencana, pendataan korban bencana, serta pendataan kerugian yang dilakukan oleh BPBD? “Pemerintah Daerah melalui BPBD bekerja sama dengan instansi terkait dan Stake holder penanggulangan bencana melaksanakan kaji cepat terkait Bencana Banjir dengan menggunakan beberapa indikator diantaranya adalah:
 - Jumlah korban terdampak, korban jiwa dan luka-luka
 - Tingkat kerusakan infrastruktur
 - Tingkat ketidakberfungsian pelayanan-pelayanan dasar
 - Cakupan wilayah bencana
 - Kapasitas pemerintah setempat dalam merespon bencana tersebut
2. Bapak D.S selaku bagian Kebencanaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 - a. Bagaimana koordinasi Dinas Kesehatan dengan BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir? “Koordinasinya dengan BPBD kita meminta data wilayah yang terdampak bencana, data korban bencana, kemudiann membuka posko pelayanan kesehatan di daerah dekat terjadinya bencana banjir. Selain itu, Dinkes juga membuka posko terpadu di Ibukota, tepatnya di lapangan futsal Molibagu. Dan semua pelayanan kesehatan itu gratis bagi korban bencana banjir.”
 - b. Apa kesulitan/kendala yang dihadapi? “Akses yang sulit dilalui karena jalan dan jembatan penghubung yang putus, sehingga dalam pendistribusian obat obatan dan logistik tidak bisa jalan saat itu juga.”
3. Bapak R.P dari Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 - a. Bagaimana koordinasi Dinas Sosial dengan BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir? “Mengumpulkan data korban atau menerima data korban dari pemerintah desa, selanjutnya kita juga membantu dalam evakuasi korban yang terdampak, membuat posko/tempat pengungsian, dan juga melakukan pendistribusian logistik.”
 - b. Apa kesulitan/kendala yang dihadapi? “Mobilisasinya kurang, fasilitas penanggulangan bencana kurang seperti kendaraan kita hanya mempunyai satu unit, yaitu mobil pick-up. Jadi untuk menjangkau daerah lain yang terkena bencana banjir secara bersamaan itu menjadi sangat sulit”
4. Bapak T.M selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 - a. Bagaimana koordinasi Dinas Sosial dengan BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir? “Jadi dalam penanggulangan bencana mana yang menjadi bagian dari Dinas PU itu kita bantu. Contohnya seperti ditemukannya jembatan rusak dan jalan longsor maka Dinas PU akan membantu untuk membukakan jalan, membuat jembatan darurat untuk dilewati dalam mendistribusikan bantuan ke tempat-tempat terjadinya bencana.
 - b. Apa kendala yang dihadapi? “Dinas PU sendiri kekurangan juga fasilitas, dikarenakan alat berat seperti excavator hanya tersedia 1 buah sehingga apabila ditemukan jalan dan jembatan yang putus di beberapa tempat secara bersamaan maka kita harus menentukan mana yang akan didahulukan dan mana yang lebih penting untuk membuka jalan yang tertimpa longsor supaya bantuan yang ada akan cepat tersalurkan ke tempat-tempat terjadinya bencana banjir.

5. Bapak W.A selaku Ketua Giat PMI Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 - a. Bagaimana koordinasi PMI dengan BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir? “Kita data dulu mana yang kena bencana, kemudian mendirikan posko pelayanan kesehatan dan dalam pelayanan kesehatan itu kita kerja sama dengan puskesmas terdekat dimana tempat terjadinya bencana banjir.”
 - b. Apa kesulitan yang dihadapi saat dilapangan? “Dikarenakan akses jembatan yang putus jadi kita harus membawa alat-alat kesehatan dengan berjalan kaki sampai ke tempat terjadinya bencana.”
6. Bapak I.A selaku Ketua TAGANA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 - a. Bagaimana koordinasi TAGANA dengan BPBD dalam kegiatan penanggulangan bencana banjir? “Saat terjadi bencana banjir kita relawan TAGANA langsung turun ke tempat terjadinya bencana bersama dinas terkait lainnya, mendata berapa banyak korban terdampak, dan membantu dalam kegiatan evakuasi dan juga kita mendirikan Daput Umum ditempat-tempat terjadinya bencana untuk menyiapkan makanan kepada korban terdampak bencana.”
 - b. Apa saja kendala yang dihadapi? “Dalam pendistribusian makanan ketempat-tempat pengungsian yang terpisah terjadi sedikit keterlambatan karena kita kekurangan fasilitas seperti kendaraan mobil dan motor
7. Hasil Wawancara Dengan Masyarakat Korban bencana Banjir di Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Responden 4 orang.
 1. Ibu S.M di desa Molibagu Kec. Bolaang uki
 - a. Apa saja kegiatan penanggulangan bencana yang bapak/ibu terima? “Menerima bantuan makanan cepat saji”
 2. Ibu U.D di Desa Bolangaso kec Bolaang uki
 - b. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan sudah optimal atau belum? “Bantuan dari segi makanan belum optimal, karna saya sebagai korban bencana yang punya anak kecil tentu anak saya termasuk tidak sehat apabila terus-menerus dalam mengkonsumsi makanan cepat saji seperti supermie, ikan kaleng dan telur ayam. Selanjutnya kegiatan penanggulangan bencana sudah begitu baik karna semua pelayanan tersedia mulai dari posko pengungsian, pelayanan kesehatan, air bersih sampai dibantu dalam membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah setelah bencana banjir selesai”
 - c. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum? “Belum, orang-orang dekat pemerintah yang hampir setiap hari mendapatkan bantuan makanan serta pakaian”
 - d. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana sudah dilakukan dengan cepat tanggap? “Ya, satu hari setelah bencana dari BPBD dan dinas terkait lainnya langsung turun ke tempat yang terkena bencana banjir”
 - e. Menurut bapak/ibu apa kekurangan BPBD dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana? “Kuranganya pengawasan terhadap penyaluran bantuan ke korban bencana sehingga bantuan tidak tersalurkan secara merata”
 - f. Apa yang diharapkan bapak/ibu dari BPBD dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana? “Saya harap ditempat kami dibuatkan tanggul penahan debit air supaya tidak kena luapan air dari sungai disetiap musim penghujan yang berpotensi terjadinya bencana banjir”

- a. Apa saja kegiatan penanggulangan bencana yang bapak/ibu terima? "Dapat bantuan berupa pakaian dan juga dievakuasi di tempat yang aman"
 - b. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan sudah optimal atau belum? "Iya sangat baik, pelayanan kesehatan gratis dan juga makanan setiap harinya yang diantar dari dapur umum"
 - c. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum? "Ya tepat sasaran"
 - d. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum? "Termasuk cepat dan tanggap. Saat terjadi bencana banjir pada malam hari saat itu juga dari BPBD langsung datang ke tempat kami yang terkena bencana banjir"
 - e. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum? "Sudah cukup baik karena tersedia semua pelayanan untuk korban terdampak"
 - f. Apa yang diharapkan bapak/ibu dari BPBD dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana? "Dapur rumah saya saat itu hanyut terbawa arus air jadi dari BPBD akan memberikan bantuan untuk membuat lagi dapur rumah yang hanyut tapi sudah hampir setahun belum ada tindak lanjut dari pihak BPBD, jadi saya berharap bantuan tersebut segera diberikan"
3. Ibu R I di Desa Bakida Kec Helumo
- a. Apa saja kegiatan penanggulangan bencana yang bapak/ibu terima? "Menerima bantuan makanan"
 - b. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan sudah optimal atau belum?"Ya sudah optimal dan sangat baik"
- c. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum?"Belum begitu merata. Karna tinggi air saat itu tidak terlalu dalam jadi saya memilih untuk tetap dirumah tapi saya juga sebagai korban bencana jarang sekali mendapatkan bantuan makanan dari dapur umum maupun makanan cepat saji berbeda dengan korban yang berkumpul di tempat pengungsian yang setiap saat mendapatkan bantuan makanan"
- d. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana sudah dilakukan dengan cepat tanggap?"Ya cepat, satu hari setelah bencana banjir BPBD dan dinas terkait termasuk ada bupati juga langsung datang meninjau tempat-tempat bencana dan juga memantau posko pengungsian korban bencana"
 - e. Menurut bapak/ibu apa kekurangan BPBD dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana?"Saya rasa sudah cukup karna dari segi pelayanan semuanya tersedia dan gratis apalagi pelayanan kesehatan dan juga air bersih"
 - f. Apa yang diharapkan bapak/ibu dari BPBD dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana?"Dalam penyaluran bantuan logistik baiknya dari pihak BPBD dan juga dinas-dinas atau pemerinah daerah langsung yang menyalurkan supaya bantuan tersalurkan secara merata"
4. Bapak A A di Desa Pakuku Jaya kec. Tomini
- a. Apa saja kegiatan penanggulangan bencana yang bapak/ibu terima?

- “Dapat bantuan makanan, pakaian bahkan sampai ke perlengkapan mandi sekalipun dan juga di evakuasi ke tempat pengungsian”
- b. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan sudah optimal atau belum? “Sudah sangat baik”
 - c. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan sudah tepat sasaran atau belum? “Ya tepat sasaran”
 - d. Menurut bapak/ibu apakah bantuan serta kegiatan penanggulangan bencana sudah dilakukan dengan cepat tanggap? “Sangat cepat, begitu juga dengan bantuan logistik”
 - e. Menurut bapak/ibu apa kekurangan BPBD dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana? “Saya rasa tidak ada kekurangan karna selama 4 bulan dari terjadinya bencana kami menerima bantuan terus-menerus mulai dari makanan, pakaian, kesehatan dan juga tempat tinggal sementara”
 - f. Apa yang diharapkan bapak/ibu dari BPBD dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana? “Di desa saya dan juga desa tetangga totalnya ada 55 rumah yang hanyut terbawa arus banjir, dan waktu itu saya dan juga masyarakat yang lain dijanjikan mendapatkan bantuan untuk dibuatkan rumah, bukan dibuatkan juga rumah yang baru tapi mungkin biaya setengahnya, tapi sudah mau 1 tahun dari bencana banjir terjadi belum ada tindak lanjut dari BPBD dan juga pemerintah daerah. Sekarang yang dilakukan masih perbaikan jalan, tanggul dan jembatan yang rusak, mungkin setelah itu baru bantuan rumah. Tapi dalam waktu hampir satu tahun terakhir ini kami menunggu termasuk waktu yang lama juga jadi sambil menunggu bantuan tersebut kami juga mendirikan rumah darurat/sementara, bahkan sampai sekarang masih ada masyarakat lain yang tinggal mengungsi di bangunan sekolah”.

Pembahasan

Berdasarkan teori kinerja organisasi menurut Indra Bastian (Fahmi, 2013: 128) yang menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, fungsi, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema yang strategis (strategic planning) suatu organisasi. Maka, dengan teori kinerja organisasi tersebut dapat mengukur dan menjelaskan Kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kab. Bolaang Mongondow Selatan. Adapun hasil penelitian berdasarkan teori kinerja organisasi tersebut yang meliputi tiga (3) aspek kinerja organisasi maka lebih jelasnya akan di paparkan di bawah ini.

Kinerja BPBD di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam penanggulangan bencana banjir sudah begitu baik namun ada beberapa indikator yang belum sepenuhnya terlaksana. BPBD Kab. Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berwenang dalam penanggulangan bencana, memiliki peran dalam penyelenggaraan penanggulangan atas berbagai bencana di wilayah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, khususnya dalam penanggulangan bencana banjir, maka pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kab. Bolaang Mongondow Selatan diperlukan kesiapan yang mantap demi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan yang baik.

a. Program

Program berkaitan dengan tujuan BPBD itu sendiri dalam penanggulangan bencana banjir, diantaranya berhubungan dengan pengurangan resiko bencana, penanganan kedaruratan saat bencana, dan pemulihan setelah terjadinya bencana. Dalam penanggulangan bencana BPBD berkoordinasi dengan perangkat daerah dan organisasi yang terlibat dalam penanggulangan bencana, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan organisasi lainnya. Dinas terkait ini sudah punya

tugas masing-masing dalam kegiatan penanggulangan bencana, seperti dinas kesehatan yang berkoordinasi dengan BPBD dalam pelayanan dibidang kesehatan, yaitu pelayanan kesehatan, dan obat-obatan gratis, Dinas Pekerjaan Umum membantu membukakan akses jalan yang tertutup akibat banjir dan tanah longsor, Dinas Sosial yang membantu dalam mendistribusikan logistik dan bahan bantuan lainnya, serta membantu dalam mengevakuasi korban bencana.

b. Kegiatan

BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun beberapa kegiatan BPBD dalam penanggulangan bencana banjir diantaranya adalah merumuskan program kegiatan BPBD berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran kegiatan pelaksanaan; mengkoordinasikan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan; melaksanakan komando melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan sarana prasarana lainnya dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; melaksanakan penanggulangan bencana, pengendalian penanggulangan bencana yang meliputi pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga/organisasi dan atau pihak yang lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan yang berlaku; menyelenggarakan, mengadministrasikan, mendistribusikan dan mempertanggungjawabkan penerimaan bantuan untuk bencana; menetapkan pembentukan Satuan Tugas

(SATGAS); melaksanakan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja; dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

c. Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan oleh BPBD kedepannya adalah mengadakan koordinasi dengan dinas terkait, dan juga mengajukan pengadaan mengenai fasilitas-fasilitas kepada pemerintah daerah supaya lebih efisien dalam menanggulangi dan mengantisipasi datangnya bencana, kebijakan ini akan lebih efektif jika fasilitas-fasilitas BPBD sudah lengkap di Kab. Bolaang Mongondow Selatan.

Hasil Penelitian dari Masyarakat mengenai bencana banjir dan tugas BPBD yang ada mengenai penanggulangan bencana belum begitu optimal, pasalnya diketahui fasilitas yang dimiliki BPBD sangat kurang, yakni hanya memiliki 1 unit mobil rescue, 1 unit mobil pick-up, 1 unit perahu karet dan beberapa tenda pengungsian. Sehingga dalam pelaksanaan teknis tersebut nantinya BPBD meminjam fasilitas bantuan lain ke Dinas/Lembaga terdekat dan relasi yang ada. Kemudian dalam hal pemulihan wilayah pasca bencana, BPBD dinilai lambat dalam melaksanakan fungsi tersebut, hal ini didapat dari penelitian di masyarakat dimana kurang lebih 1 tahun setelah bencana banjir terjadi pemulihan wilayah pasca bencana belum sepenuhnya terlaksana.

lebih sehat.

Penutup

Kesimpulan

1. Kinerja BPBD kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam seperti bencana banjir sudah cukup baik, akan tetapi belum maksimal karena tidak semua indikator terpenuhi, salah satunya adalah BPBD termasuk lambat dalam melakukan kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah pasca bencana yang sampai setahun terakhir dari bencana terjadi belum terlaksana dengan sepenuhnya.

2. Kendala yang sering dihadapi oleh BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah masih kurangnya Sumber Daya manusia, dan kurangnya peralatan atau fasilitas alat sarana dan prasarana.
3. Dalam penanggulangan bencana banjir BPBD berkoordinasi dengan beberapa dinas/instansi terkait, seperti dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pu, dan organisasi lainnya untuk mengatasi keterbatasan yang ada pada BPBD seperti pelayanan di bidang kesehatan, pendistribusian bantuan sandang dan pangan, dan pembuatan jalan/akses darurat.

Saran

1. Diharapkan BPBD lebih cepat dalam membantu masyarakat yang terkena bencana, baik dalam hal tempat pengungsian, makanan, maupun bantuan yang lainnya. Dan bantuan yang diberikan harus menyeluruh dan merata kepada masyarakat Bolaang Mongondow Selatan.
2. BPBD dan Dinas terkait lainnya harus memiliki fasilitas penanggulangan bencana yang lengkap dan memadai agar tidak menghambat jalannya proses kegiatan penanggulangan bencana dan berlangsung cepat selesai. Pasalnya wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang tersebar 7 Kecamatan rawan akan bencana banjir dan tanah longsor di setiap tahunnya pada musim hujan. Sehingga membutuhkan fasilitas penanggulangan bencana yang lebih lengkap dan lebih memadai agar proses penanggulangan bencana banjir dapat diatasi dengan baik dan cepat.
3. Diharapkan BPBD dapat dengan cepat melakukan fungsi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada wilayah Pascabencana seperti perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan Prasarana dan Sarana Umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan

sosial ekonomi dan budaya, dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Bastian Indra (Fahmi, 2013: 128). Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya. Alfabeta Bandung*
- Bernardin, H. J dan Russell, J. E. A. (2013), Human Resource Management, Sixth Edition. New York: McGrawHill*
- Creswell, J.W. (2016). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Cetakan Pertama, Yogyakarta:Pustaka Pelajar*
- Creswell, John .W. (2009). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar*
- Creswell, John W. 2012. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Fahami, Irham. 2013. Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasinya. Alfabeta Bandung.*
- Harbani, Pasolon, (2014). Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung.*
- Mahsun. M. 2006. Pengukuran Kinerja Sector Public. BPFE: Yogyakarta*
- Nurjanah, dkk. 2013. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta*
- Pasolong, Harbani. (2010). Teori Administrasi Publik,Alfabeta, Bandung*
- Sedarmayanti, (2001). Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja. Jakarta: Mandar Maju.*
- Supardi, (2013). Aplikasi Sistematika Dalam Penelitian Konsep Sistematika Yang Lebih Komprehensif. Jakarta: Change Publication*
- Wibowo. 2007. Manajemen Kinerja. Edisi Kedua. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.*